

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI  
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat S-1**



Disusun Oleh:  
**Alfian Ahmad Fauzi**  
NIM.15.0102.0186

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
( Studi Empiris Di Kecamatan Ngadirejo  
Kabupaten Temanggung )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun oleh :  
**Alfian Ahmad Fauzi**  
NIM. 15.0102.0186

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2018**

**SKRIPSI**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTANBILITAS**  
**DANA DESA**  
**(Studi Empiris Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Alfian Ahmad Fauzi**

NPM 15.0102.0186

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal **28 Agustus 2018** .....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

  
Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Pembimbing I

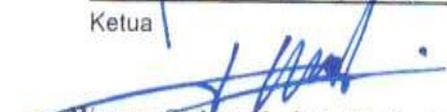
  
Anissa Hakim P., S.E., M.Sc.

Pembimbing II

Tim Penguji

  
Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Ketua

  
Wawan Sadyo N., S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris

  
Farida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **12 OCT 2018** .....

  
Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Ahmad Fauzi

NIM : 15.0102.0186

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

Skripsi dengan judul:

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA ( Studi Empiris Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung )**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 15 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Alfian Ahmad Fauzi  
NIM 15.0102.0186

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Alfian Ahmad Fauzi  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Tempat, Tanggal lahir** : Temanggung , 10 Juli 1993  
**Agama** : Islam  
**Status** : Belum Menikah  
**Alamat Rumah** : Punduhan RT 03 RW 04 Kandangan  
Temanggung  
**Alamat Email** : [alfianahmadf35@gmail.com](mailto:alfianahmadf35@gmail.com)

### Pendidikan Formal

**Sekolah Dasar** (1999-2005) : SD N Kandangan  
**SMP** (2005-2008) : SMP N 2 Temanggung  
**SMA** (2008-2011) : SMA N 1 Temanggung  
**Perguruan Tinggi** (2011-2014) : D3 Akuntansi Politeknik Negeri Semarang  
(2015-2018) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

### Pengalaman Organisasi :

- Resimen Mahasiswa Satuan 950 PATIGENI Politeknik Negeri Semarang periode 2012-2013

## MOTTO

*Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.*

*(Q.S. Al Baqoroh: 45)*

*Bersemangatlah untuk mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah.*

*(H.R. Muslim)*

*“Build Your Dreams, or Someone Else Will Hire You To Build Theirs”*

*(Albert Eistein)*

*“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”*

*(Schopenhauer)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang memberi bimbingan dan pengarahan secara baik hingga sampai terlaksananya sidang skripsi.
2. Ibu Annisa Hakim P, S.E., M.Sc, Selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini hingga sampai terlaksananya sidang skripsi.
3. Bapak Wawan Sadtyo N, S.E, M.Si, Ak, CA Selaku Dosen Penguji I yang penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini
4. Ibu Farida S.E, M.Si, Ak, CA Dosen Penguji II yang penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini

5. Kepala Desa dan Jajaran Perangkat Desa se Kecamatan Ngadirejo kabupaten Temanggung yang sudah bersedia mengizinkan saya untuk memperoleh data-data penelitian di lokasi tersebut sehingga skripsi saya lancar tanpa kendala suatu apapun.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Wassalamu'alailum Wr. Wb.

Magelang, 15 Agustus 2018

Peneliti

Alfian Ahmad Fauzi

NIM.15.0102.0186

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Halaman Riwayat Hidup.....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
Abstrak .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b>	
1. Telaah Teori .....	12
a. Teori Agensi .....	13
b. Akuntabilitas.....	14
c. Dana Desa.....	14
d. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa.....	16
e. Partisipasi Masyarakat.....	18
f. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa.....	18
g. Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa.....	19
h. Pengendalian Internal .....	21
2. Telaah Penelitian Terdahulu .....	22
3. Perumusan Hipotesis.....	23
4. Model Penelitian .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Populasi dan Sampel .....	31
B. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data .....	31
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	32
D. Metoda Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	40
B. Statistik Deskriptif Responden.....	40
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	41
D. Uji Kualitas Data.....	43
E. Analisis Regresi Linier Berganda .....	46

F. Uji Hipotesis .....	47
G. Pembahasan.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Keterbatasan.....	61
C. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rincian Dana Desa Kabupaten Temanggung .....	5
Tabel 1.2	Rincian Dana Desa Se Kecamatan Ngadirejo .....	6
Tabel 2.1	Tabel Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1	Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	32
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian .....	40
Tabel 4.2	Profil Responden .....	41
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif .....	41
Tabel 4.4	<i>Cross Loading</i> .....	44
Tabel 4.5	Pengujian Reliabilitas.....	46
Tabel 4.6	Hasil Uji Linier Berganda .....	46
Tabel 4.7	Koefisien Determinasi .....	47
Tabel 4.8	Uji F .....	48
Tabel 4.9	Uji t .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian .....	30
Gambar 3.1 Penerimaan UjiF.....	38
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	39
Gambar 4.1 Uji F .....	48
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Kompetensi Pengelola Dana Desa... ..	49
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	50
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Partisipasi Masyarakat.....	50
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa .....	51
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Pengendalian Internal.....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	66
Lampiran 2	Daftar Sampel dan Pengambilan Kuesioner.....	72
Lampiran 3	Tabulasi Data Mentah.....	73
Lampiran 4	Hasil Pengujian.....	82
Lampiran 5	Tanda Terima Kuesioner .....	83

## ABSTRAK

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOAAN DANA DESA ( Studi Empiris di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)**

**Oleh:**

**Alfian Ahmad Fauzi**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan sampel perangkat desa kantor kepala desa di Kecamatan Ngadirejo yang mengelola dana desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 64, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu perangkat desa yang tersiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra, dan memiliki masa jabatan minimal 1 (satu) tahun, serta pendidikan minimal SMP/SLTP sederajat. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa tidak berpengaruh, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desaberpengaruh negatif, sedangkan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

***Kata Kunci : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak ditetapkannya Undang - Undang tentang otonomi daerah di tahun 2014, muncul isu strategis tentang kemampuan kelembagaan yang menyangkut lima aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, yaitu organisasi, kebijakan, manajemen, sistem akuntabilitas dan budaya organisasi (Kompasiana.com). Berkaitan dengan sistem akuntabilitas dalam pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai keuangan desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di desa, sumber-sumber pendapatan di desa seperti Pendapatan Asli Desa yang terdiri a) hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah yang kemudian keduanya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU

Nomor 33 tahun 2004. Menurut UU No 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). SAPDesa tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Penyusunan SAPDesa dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa. Kebutuhan inilah yang ditangkap pada Rapat Pleno KSAP dengan Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah melalui *High Level Meeting* lintas kementerian, sebagai tindak lanjut Rapat dengan Komite Konsultatif, KSAP sebagai *standard setter* dipercaya untuk mengemban amanah sebagai penyusun SAPDesa.

Proses penyerahan kewenangan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa sebagai sebuah pemerintah daerah. Dimana desa diberikan kepenuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, tentunya dengan mengandalkan sumber daya manusia yang ada di desa sebagai subjek pelaksana pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa. Atas dasar pertimbangan itulah, maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Pemberian ADD kepada desa karena didasari oleh beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga Program ADD adalah terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu.

Menurut Hidayana dalam Subroto (2009), ada empat faktor utama yang menyebabkan lahirnya ADD, yaitu: (1) desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula; (2) Kesejahteraan masyarakat desa rendah; (3) Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan; dan (4) Banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. ADD yang diberikan tersebut pada

prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah kebijakan yang baru. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun pada tahun 2015. Selanjutnya anggaran meningkat menjadi Rp 46,9 triliun di periode 2016, dan naik lagi menjadi Rp 60 triliun di 2017 (Kemenkeu.go.id).

Berdasarkan data yang dirilis ICW tentang praktik korupsi penggunaan dana desa sejak 2016 sampai dengan 2017 telah ditemukan 110 kasus korupsi, dimana dalam 110 kasus korupsi tersebut diduga terdapat 107 orang pelaku merupakan Kepala Desa(<https://antikorupsi.org>). Namun, berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades melainkan karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran dan ketidakefektifitasnya dalam mengelola alokasi dana desa. Selain itu juga disebabkan karena minimnya kontrol dari pemerintah dan masyarakat.

Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan dengan 266 desa dan semuanya mendapatkan dana desa. Dibawah ini rincian dana desa per kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2017

Tabel 1.1  
Rincian Dana Desa Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Besaran Dana
1	Ngadirejo	15.168.039.000
2	Bulu	14.949.641.000
3	Kandangan	13.431.439.000
4	Kaloran	12.375.177.000
5	Pringsurat	11.772.321.000
6	Candiroto	11.658.955.000
7	Kedu	11.104.287.000
8	Bejen	11.088.634.000
9	Tembarak	10.862.350.000
10	Parakan	10.514.549.000
11	Wonobojo	10.216.431.000
12	Jumo	10.080.831.000
13	Kledung	9.845.654.000
14	Selopampang	9.509.672.000
15	Kranggan	9.449.014.000
16	Bansari	9.415.270.000
17	Tlogomulyo	9.339.536.000
18	Tretep	9.240.163.000
19	Gemawang	8.616.907.000
20	Temanggung	4.403.744.000
<b>JUMLAH</b>		<b>213.042.614.000</b>

Sumber : Peraturan Bupati Temanggung nomor 8 tahun 2018

Kecamatan Ngadirejo menjadi objek penelitian ini dikarenakan Kecamatan Ngadirejo termasuk kecamatan yang mendapatkan alokasi dana desa paling besar diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Temanggung selain itu salah satu desa di Kecamatan Ngadirejo yaitu Desa Dlimoyo merupakan percontohan desa terbaik di Kabupaten Temanggung dalam mengelola alokasi dana desa, sehingga penelitian ini ingin mengetahui apakah desa lain dalam Kecamatan Ngadirejo sudah bagus pengelolaan keuangan alokasi dana desanya seperti Desa Dlimoyo. Wilayah Kecamatan Ngadirejo terbagi menjadi 19 desa. Adapun rincian jumlah desa yang menerima dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2  
Rincian Dana Desa Se Kecamatan Ngadirejo

No	Desa	Besaran Dana
1	Giripurno	958.110.000
2	Katekan	956.547.000
3	Kataan	922.094.000
4	Tegalrejo	854.851.000
5	Dlimoyo	817.469.000
6	Gondang Winangun	817.344.000
7	Purbosari	809.478.000
8	Mangunsari	799.321.000
9	Campursari	783.928.000
10	Medari	773.439.000
11	Ngadiejo	767.782.000
12	Karanggedong	767.671.000
13	Banjarsari	761.068.000
14	Pringapus	743.429.000
15	Munggangsari	733.278.000
16	Petirejo	731.201.000
17	Gandu Wetan	728.474.000
18	Ngaren	723.899.000
19	Gejagan	718.656.000
<b>JUMLAH</b>		<b>15.168.039.000</b>

*Sumber :Peraturan Bupati Temanggung nomor 8 tahun 2018*

Setiana dan Yuliani (2017) meneliti tentang pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan Mada dkk (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian tersebut adalah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, Mada

dkk (2017) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Munti dan Heru (2017) meneliti tentang pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireun dengan hasil bahwa Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Perangkat Desa. Selanjutnya menurut Mada dkk (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang telah dilakukan oleh Mada dkk (2017) dengan persamaan menggunakan semua variabel. Sedangkan perbedaannya yang terdiri dari **Pertama**, menambah variabel **ketaatan pelaporan keuangan desa** karena menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) melalui PP No 24 Tahun 2005 poin 3 menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP. Serta didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2018) yang menyatakan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. **Kedua**, menambah variabel pengendalian internal, karena pengendalian internal

merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian terhadap kegiatan penggelapan (*fraud*)(Mulyadi, 2005 : 78).

**Ketiga** Objek penelitiannya mengambil di Kecamatan Ngadirejo , karena di Kecamatan Ngadirejo menerima Alokasi Dana Desa paling banyak di Kabupaten Temanggung Selain itu salah satu desa di Kecamatan Ngadirejo yaitu Desa Dlimoyo merupakan percontohan desa terbaik di Kabupaten Temanggung dalam mengelola alokasi dana desa, sehingga penelitian ini ingin mengetahui apakah desa lain dalam Kecamatan Ngadirejo sudah bagus pengelolaan keuangan alokasi dana desanya seperti Desa Dlimoyo.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Menguji secara empiris komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Menguji secara empiris ketaatan pelaporan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Menguji secara empiris pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **D. Kontribusi Penelitian**

#### **a. Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **b. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan sehat.

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan mendukung penelitian, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis yang diajukan dan model penelitian.

### **BAB III METODA PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, data penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metoda analisis data, dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Telaah Teori

###### a. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak

pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### **b. Akuntabilitas**

Menurut PP No 71 tahun 2010 tentang SAP, Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Ihyaul Ulum(2010:41) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai sasaran pertanggungjawaban yang berisikan laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam

pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah “*asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### c. Dana Desa

Dana desa (PP No. 60 tahun 2014) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Tidak hanya formulanya yang berubah, besaran dana desa juga berubah dari Rp. 20,766 triliun menjadi Rp. 46,966 triliun dalam APBNP 2016. Berdasarkan APBN 2016, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi: 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri. 2) Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni **tahap pertama** Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Pengalokasiandari APBD ke APBDesa(oleh Bupati/Walikota).Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten **Tahap kedua** /Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari: a) Anggaran, b) Buku kas, c) Buku pajak, d) Buku bank, e) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.Oleh karena itu

pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

#### **d. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa**

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam anonim, *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2004), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di 78.000 desa yang ada.

Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumber daya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumber daya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

#### **e. Partisipasi Masyarakat**

Juliantara (2002:87) menyatakan bahwa substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003:818). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

#### **f. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa**

Mowday et al. (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi (Fitriana, 2015).Lubis (2010) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauhmana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya tersebut dalam organisasi tersebut. Dalam pemerintahan desa, komitmen organisasi bisa dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Cavoukian *et al* (2010:408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas.Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas.Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas.Roberts (2002:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap system akuntabilitas.Brown dan Moore (2001:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

### **g. Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa**

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Menurut SAP ( Standar Akuntansi Pemerintahan ) melalui PP No 24 Tahun 2005 poin 3 menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Berdasarkan pernyataan diatas diperoleh bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa harus mengacu pada SAP dan berkaitan dengan kewajiban pelaporan diberikan kepada bupati/walikota melalui camat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan,

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014, tidak hanya mengubah peran desa menjadi unit kecil pemerintah desa, tetapi juga sebagai entitas pelaporan yang wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu periode kepada pengambil keputusan, dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) melalui PP. No. 24 Tahun 2005 yang merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

#### **h. Pengendalian Intern**

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian terhadap kegiatan penggelapan (*fraud*) (Mulyadi, 2005:78).

Pengendalian intern akuntansi yang baik dalam pemerintahan desa, apabila didukung dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku, maka akan mendukung ketaatan pelaporan keuangan. Pada dasarnya manusia cenderung mengikuti peraturan yang sudah ada dan karena orang-orang disekitarnya melakukan hal yang serupa. Setiap organisasi pasti memiliki peraturan yang mengikat bagi anggotanya. Peraturan tersebut bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar, sehingga

peraturan dapat dipatuhi dan dijadikan sebagai pengendalian bagi instansi pemerintahan.

## 2. Telaah Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Hidayah dan Wijayanti (2017)	Partisipasi & Transparansi	Tahap perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi.
2	Setiana dan Yuliani (2017)	Kompetensi & Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Pemahaman Perangkat Desa tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3	Mada, dkk (2017)	Kompetensi, Komitmen Organisasi, & Partisipasi Masyarakat	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 75,10%
4	Munti dan Heru (2017)	Ketaatan Pelaporan Keuangan	Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
5	Kartika (2012)	Partisipasi Masyarakat Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Kompetensi Perangkat Desa Tidak Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**Tabel 2.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**  
**( Lanjutan )**

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
6	Widyatama, dkk ( 2017 )	Kompeensi & Pengendalian Internal Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Perangkat Desa Tidak Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pengendalian Internal berrpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data dari berbagai sumber penelitian

### 3. Perumusan Hipotesis

#### a) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Ketika *principal* memberikan amanah kepada *agent* dalam wewenang atas tanggungjawab sebagai bentuk pertanggungjawab segala aktivitas yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepihak *principal* sebagai pihak yang berwenang. Jika perangkat desa itu paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Oleh karena itu dengan adanya pemahaman perangkat desa yang baik maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan baik juga. Berdasarkan penelitian Dailiati dan Sudaryanto (2016) menunjukkan bahwa

peningkatan pemahaman UU No 6 tahun 2014 tentang desa berhasil dengan baik. Pendapat tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada, dkk (2017), Subroto (2009), Ferina (2016), Dewi (2016), dan Makalalag (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **H1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

#### **b) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Masyarakat / rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah agen, maka pemerintah desa sudah semestinya mengutamakan kepentingan umum dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan hingga mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan desa kepada rakyat. Dengan demikian pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah salah satu indikator responsibilitas pemerintah desa terhadap rakyat. Akuntabilitas dipengaruhi tingkat partisipasi rakyat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat akan mempengaruhi pengambilan keputusan pada pemerintahan desa, oleh karena itu ada pengaruh positif antara peran masyarakat terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Seperti yang telah dibuktikan dalam penelitian Subroto (2009), Dewi (2016), Ferina (2016) dan Makalalag (2017).

### **H2. Partisipasi masyarakat berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

### **c) Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa**

Sesuai dengan perannya sebagai agen yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada rakyat, maka dengan komitmen organisasi yang tinggi akan berusaha dengan maksimal untuk mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan. Demikian karena mereka sadar bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, akan menjadi besar dan kuat atau sebaliknya menjadi lemah tidak berdaya yang keduanya tergantung pada cara pengelolaan keuangannya (Halim, 2012).

Oleh karena itu, semakin tinggi komitmen organisasi para aparatur pemerintah desa, maka akan semakin tinggi pula tingkat rasa tanggungjawabnya sampai pada akhirnya akan melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel. Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zalni (2013) yang menguji pengaruh komitmen karyawan dan penerapan system pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah, dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa komitmen karyawan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal serupa juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2015) dimana komitmen karyawan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

**H3. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

#### **d) Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Menurut SAP ( Standar Akuntansi Pemerintahan ) melalui PP No 24 Tahun 2005 poin 3 menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyelenggarakan kewajiban melaporkan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP ).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu periode kepada pengambil keputusan, dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif & tertib, dan disiplin anggaran. Akuntabel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (partisipatif). Selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari konsistensi, tepat waktu, tepat jumlah, dan taat asas.

Sebagai agen yang bertanggungjawab tentunya pemerintah desa akan membuat laporan keuangan desa secara akuntabel, sebagai wujud tanggungjawab terhadap pemerintah, yang jauh lebih utama adalah tanggungjawab moral kepada rakyat. Hubungannya dengan akuntabilitas laporan keuangan dana desa, bahwa semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan desa yang akuntabel. Begitu sebaliknya, apabila aparatur desa tidak taat terhadap pelaporan keuangan maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang akuntabel. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Munti dan Heru (2017) yang mendapatkan hasil bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap `kinerja pengelolaan keuangan desa.

#### **H4. Ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

##### **e) Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

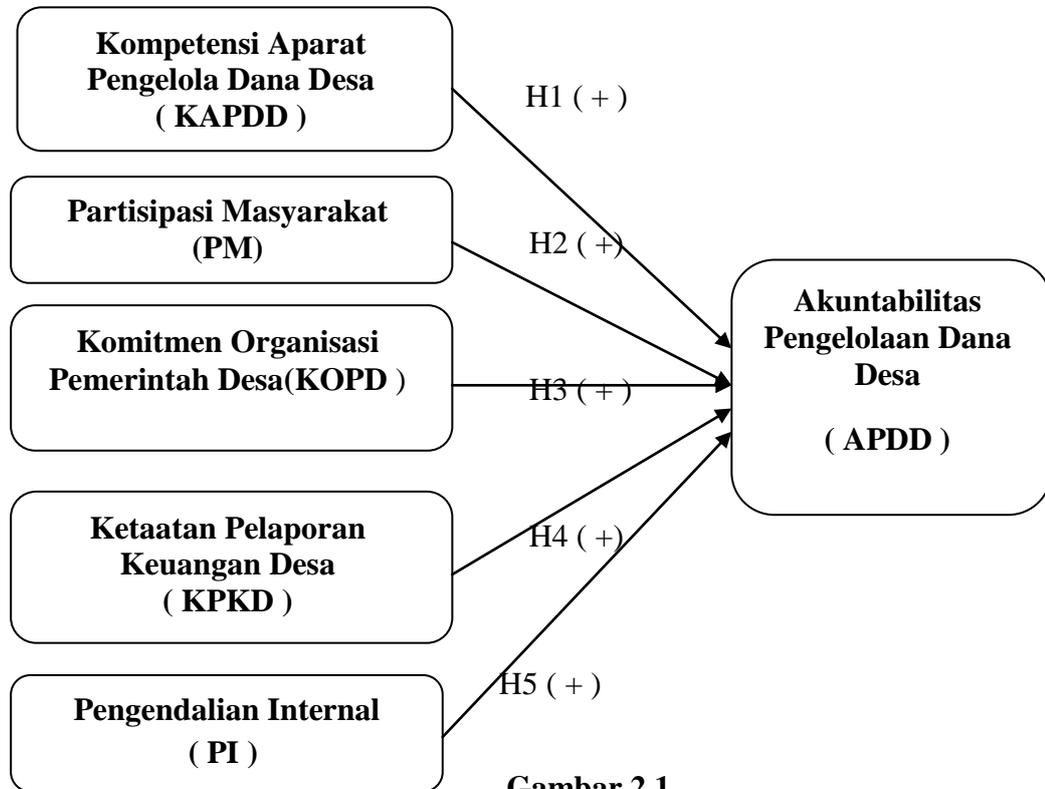
Pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan. Dengan pengendalian internal yang baik maka akan mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada dasarnya manusia cenderung mengikuti peraturan yang sudah

ada dan karena orang-orang disekitarnya melakukan hal yang serupa. Setiap organisasi pasti memiliki peraturan yang mengikat bagi anggotanya. Peraturan tersebut bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar, sehingga peraturan dapat dipatuhi dan dijadikan sebagai pengendalian khususnya pengelolaan dana desa.

Oleh karena itu, semakin baik pengendalian internal dana desa maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama dkk (2013) yang menguji pengaruh kompetensi & Pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**H5. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

#### 4. Model Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Populasi Dan Sampel**

Populasi dapat diartikan sebagai totalitas semua nilai dari hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifatnya (Sudjana, 2002:6). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengelola Dana Desa Kantor Kepala Desa di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan kasi Kesra.
2. Memiliki masa kerja jabatan minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMP/SLTP sederajat.

#### **B. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

##### 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012 :14). Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Umar (2003 : 56), data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data primer dapat

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2012:225).

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarikan kepada pegawai pengelola keuangan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung..

### C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana desa adalah karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan ( <i>skill</i> ), pengetahuan ( <i>knowledge</i> ) dan kemampuan ( <i>ability</i> ) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).	a. Pengetahuan b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan c. Keahlian teknis d. Kemampuan mencari solusi e. Inisiatif dan bekerja f. Keramahan dan kesopanan
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat (Juliantara, 2002)	Diukur dengan skala likert 5 poin dan menggunakan instrumen (Mada dkk, 2017) yang terdiri dari 6 pernyataan yaitu sebagaiberikut : Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan program desa a. Mengusulkan rencana anggaran b. Terlibat dalam rapat paripurna

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**  
**( Lanjutan )**

Variabel	Defini	Pengukuran
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	<p>Komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi (Fitriana, 2015).</p>	<p>Diukur dengan skala likert 5 poin dan menggunakan instrumen (Mada dkk, 2017) yang terdiri dari 5 pernyataan yaitu sebagai berikut :</p> <p>a. Keyakinan terhadap tujuan Organisasi</p> <p>b. Perasaan memiliki organisasi</p> <p>c. Mempertahankan keanggotaan organisasi</p> <p>d. Kesetiaan dalam organisasi</p> <p>e. Kesiediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi</p>
Ketaatan	<p>Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996).</p>	<p>Diukur dengan skala likert 5 poin dan menggunakan instrumen (Munti dan Fahlevi, 2017)) yang terdiri dari 8 pernyataan dari empat indikator yaitu sebagai berikut :</p>
Pelaporan Keuangan		<p>a. Transparasi</p> <p>b. Akuntabel</p> <p>c. Partisipatif</p> <p>d. Tetib administrasi dan peraturan</p>
Pengendalian Internal	<p>Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian fraud (Mulyadi, 2005 : 78).</p>	<p>Diukur dengan skala likert 5</p>

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**  
**( Lanjutan )**

Variabel	Definisi	Pengukuran
Akuntabilitas Pengelola Dana Desa	Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah ( <i>principal</i> ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah ( <i>principal</i> ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta	Diukur menggunakan instrumen (Mada dkk, 2017) yang terdiri dari 5 pernyataan yaitu sebagai berikut : a. Kejujuran dan keterbukaan informasi b. Kepatuhan dalam pelaporan c. Kesesuaian prosedur d. Kecukupan informasi e. Ketepatan penyampaian laporan

#### **D. Metoda Analisis Data**

##### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Penelitian juga

menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari *mean*, deviasi standar, minimum dan maksimum (Ghozali 2016:19).

## **2. Uji Kualitas Data**

### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi.

Ketika pada pengelompokkan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah factor rotation. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengansudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut oblique rotation. Rotasi orthogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax* dan *Promax* (Ghozali, 2016:55). Asumsi yang mendasari dapat tidaknya

digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan Bartlett test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus  $> 0,50$  dan *cross loading*  $> 0.50$  untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2016:57).

#### **b. Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2016: 47-48).

### **3. Analisis Regresi Linear Berganda**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang di formulasikan sebagai berikut :

$$APDD = \beta_1 KAPDD + \beta_2 PM + \beta_3 KOPD + \beta_4 KPKD + \beta_5 PI + e$$

Dimana :

$$APDD = \text{Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa}$$

KAPDD= Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

PM = Partisipasi Masyarakat

KOPD= Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

KPKD= Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa

PI =Pengendalian Internal

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Regresi

$e$  = *Error*(tingkat kesalahan)

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Koefisien Determinasi $R^2$

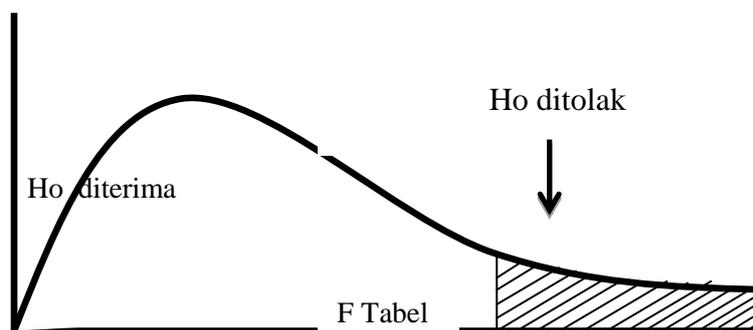
Menurut Ghozali (2016:96), koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  adalah antara nol sampai 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

##### b. Uji F (*Goodness of Fit*)

Menurut Suliyanto (2011 ) Uji ini digunakan untuk mengambil apakah variabel independen  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_n$  secara bersama sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% . Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang ( $df_1$ ) = k dan derajat kebebasan penyebut ( $df_2$ ) = n-k-1, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan

membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dengan kriteria:

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $p\text{ value} < \alpha = 0,05$ , artinya model yang digunakan bagus (*fit*)
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $p\text{ value} > \alpha = 0,05$ , artinya model yang digunakan tidak bagus (*tidak fit*)



**Gambar 3.1**

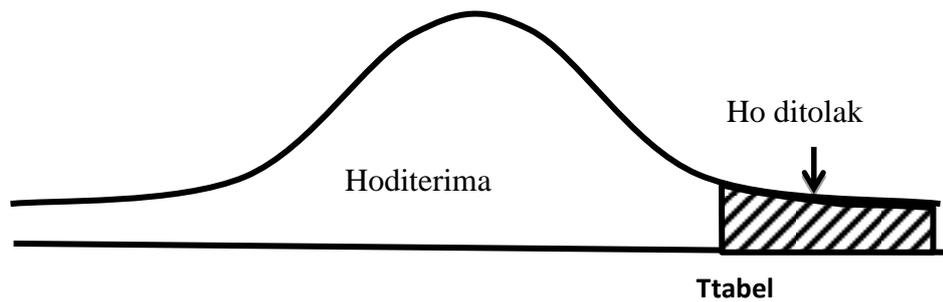
**Penerimaan Uji F**

**c. Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2016: 97). Proses pengujian ini dilakukan berdasarkan  $t$  hitung dengan tingkat kepercayaan 5%. Ketentuan yang digunakan dalam analisis ini adalah *Level of significance* 0,05 dengan derajat keterbatasan  $df = n - k$ . Kriteria penerimaan hipotesis positif:

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $p\text{ value} < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2) Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  atau  $p \text{ value} > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



**Gambar 3.2**

**Penerimaan Uji t**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola danadesa, partisipasimasyarakat, komitmen organisasi pemerintahan desa,ketaatan pelaporan keuangan desa, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 64 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, dan Pengendalian Internal dalam menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 62.9% sedangkan sisanya 37.1% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.
2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal berpengaruh positif, sedangkanKetaatan Pelaporan Keuangan Desa, Kompetensi Aparat

Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya di Desa se-Kecamatan Ngadirejo sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh Kecamatan Di Kabupaten Temanggung.
2. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden pada kuesioner yang disebarakan. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Serta hasil penelitian ini hanya didasarkan pada data secara tertulis dari kuesioner.
3. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## **C. Saran**

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan cara menambahkan populasidi Kecamatan lain di Kabupaten Temanggung agar lebih mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian dan perlu dilakukan

penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.

2. Penelitian selanjutnya selain menggunakan metode kuesioner, perlu adanya penambahan metode wawancara, agar persepsi dari responden lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya pada desa yang akan diteliti.
3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desaseperti karakteristik pembangunan desa karena ada hubungan antara karakteristik pembangunan desa (Mulyanto, 2014) dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin desa itu maju maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa Indikator dan karakteristik pembangunan desa sebagai basis implementasi atas undang-undang desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi. 2018. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. *Skripsi FEB UMM Magelang*
- Blanchard, P. Nick dan James W. Thacker. 2004. *Effective Training: System, Strategies, and Practices*. Second edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Dailiati, Surya dan Sudaryanto. 2016. Peningkatan Pemahaman UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. *Artikel Pengabdian Masyarakat. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning*.
- Devas, Nick dan Grant Ursula. 2003. Local Government Decision Making Citizen Participation and Local Accountability: some Evidence From Kenya and Uganda. *Public Administration and Developmen. Vol.23, Page 3009*.
- Dewi, Retno Astuti. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual. Vol.3, No. 6 hal.311-327*.
- Ebrahim, Alnoor. 2003. Accountability In Practice: Mechanisms for NGO's. *World Development, Vol. 31*.
- Ferina, Ika Sasti. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol.14, No.3. Hal.321-336*.
- Frink, Dwight D dan Klimoski Richard. 2004. Advancing Accountability Theory and Practice: Introduction to The Human Resource Management Review Special Edition. *Human Resource Managemen Review. Vol. 14, Page 1-17*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multi variate Dengan Program SPSS. Cetakan Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hariyani, Diyah Santi dan M. Agus Sudrajat. 2016. Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Teknologi *Accounting Information System* Pada Desa-Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016*.

- Hidayah, Nurul dan Iin Wijayanti. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254- 3198.*
- Jensen, M. C dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.*
- Juliantara, Dadang. 2002. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa.* Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Keperilakuan Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Mada, Syarifudin, Linjte Kelangi dan Hendrik Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo.
- Magdalena, Betaria, Aji Ratna Kusuma, dan Heriyono Susilo Utomo. 2012. Implementasi Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Administrative Reform, 2013, 1 (3): 668 -679*
- Makalalag, Astri Juainita. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill". Vol. 8, No. 1. Hal.149-158.*
- Mowday, R. T., R. M. Steers., dan L. W. Porter. 1979. The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior. 11, p.: 224-247.*
- Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Munti, Finta dan Heru Pahlevi. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 18 No. 2 Hal: 172-182.*
- Setiana, Novindra Dwi dan Nur Laila Yuliani. 2017. Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah*

*Magelang.*

- Setiawan, Made Wiradarma, A. Tungga Atmaja, dan N.L.G. Erni Sulindawati. 2017. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 7 No:1*
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suprihanto, J. 2002. *Penelitian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta : BPFE.
- Widyatama dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa (ADD).
- Zalni, Fitri. 2013. Pengaruh Antara Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris DPKD Pemerintah Kota di Sumatra Barat). Skripsi. Padang: UNP.